

Stop Deindustrialisasi

Senin, 30 November 2009

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Di tengah “drama” perseteruan “cicak-buaya” dan kasus Bank Century, perhatian bangsa ini harus tetap diarahkan untuk memulihkan ekonomi di tengah krisis global. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan III 2009 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,2%. Hampir semua sektor tumbuh positif dengan rekor pertumbuhan tertinggi dinikmati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi (18,2%), namun perdagangan, hotel dan restoran mengalami kontraksi hingga minus 0,6%. Industri manufaktur yang telah menunjukkan deindustrialisasi dini sejak 2000 tercatat hanya tumbuh 1,3%. Sektor riil belum pulih 100% dari dampak krisis global.

Antara tahun 1970an hingga sekarang, industri manufaktur telah menjadi *prime mover* PDB dan ekspor nonmigas Indonesia. Peranan sektor industri meningkat pesat meninggalkan sektor pertanian yang kontribusinya semakin menurun. Hingga akhir tahun 2008, peranan sektor industri manufaktur telah mencapai sekitar 28% dari PDB, sementara sektor pertanian hanya menyumbang 14% terhadap PDB. Dari kacamata ekspor, ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 83-85% terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64-67% terhadap total ekspor Indonesia selama 1994-2008.

Kendati demikian, gejala deindustrialisasi mulai menghantui Indonesia. Pertumbuhan industri manufaktur sejak krisis 1998 turun begitu drastis. Industri manufaktur nonmigas selama 1987-1996 mengalami pertumbuhan rata-rata 12% per tahunnya, lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Antara tahun 2000-2008, industri manufaktur hanya tumbuh rata-rata 5,7% per tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB (5,2%).

Ada beberapa faktor penjelas di balik gejala deindustrialisasi. Pertama, deindustrialisasi mulai terlihat ketika banyak terjadi penurunan jumlah perusahaan karena tutup usaha atau hengkang ke negara lain, yang pada gilirannya menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Fenomena deindustrialisasi dini agaknya perlu diantisipasi karena di banyak negara biasanya peran industri manufaktur mengalami penurunan setelah mencapai 35% dari PDB. Rata-rata kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sejak tahun 2000 hanya sekitar 27-28%.

Kedua, terjadinya pergeseran dari sektor industri menuju ke sektor jasa. Perekonomian Indonesia sebelum krisis 1998 yang ditopang oleh industri kini bergeser ke sektor jasa, terutama jasa modern yang kurang menyerap tenaga kerja, yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin besar. Banyak industriawan yang banting setir menjadi pedagang karena lebih menguntungkan.

Ketiga, salah satu pemicu deindustrialisasi adalah rendahnya dukungan perbankan. Kredit perbankan ke sektor industri secara absolut memang tumbuh, tetapi persentasenya makin rendah. Tahun 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 15%

kredit perbankan. Salah satunya karena banyak industri dianggap bermasalah atau masuk kategori *sunset industry*.

Keempat, masih lemahnya dukungan universitas dan lembaga riset di negeri ini dalam membantu mengatasi masalah riil yang dihadapi oleh industri, lambatnya transfer teknologi, penetrasi pasar ekspor, dan pengembangan produk maupun proses produksi.

Dalam konteks inilah, reformasi sektor industri masih "jalan di tempat." Hal ini karena sektor ini Dalam konteks inilah perlu dicermati apa masalah yang dihadapi oleh industri, terutama industri yang menjadi prioritas nasional dan RUSNAS.

Menyadari hal tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM), selaku perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, berinisiatif untuk memanfaatkan peluang yang ada di tengah kondisi dunia industri yang sedang krisis saat ini dengan kegiatan kerjasama riset industri berskema solusi menang-menang (*co-creation* dan *co-sharing*). Beberapa hal yang diharapkan melalui inisiatif ini adalah: (1) perusahaan dalam berbagai sektor industri dapat bertahan dalam krisis keuangan global dan tetap bertumbuh; (2) kegiatan riset menjadi pemicu bahkan bagian penting dalam proses kreatif produktif di berbagai sektor industri sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan teknologi secara luas; (3) munculnya pola kerjasama antara Universitas dan Industri yang berskema solusi *win-win* menang-menang sehingga dapat menjadi titik masuk pengembangan kebijakan riset industri nasional.

Di banyak negara, kemitraan antara universitas dan industri terbukti membawa banyak dampak positif. Pengalaman di Jepang, sebagai ilustrasi, kemitraan ini amat mendukung pengembangan sistem inovasi nasional, universitas dan industri dapat bersama-sama mengelola ketidakpastian teknologi, dan juga memanfaatkan sistem kekayaan intelektual (Watanabe, 2009).

Bidang kerjasama riset industri yang dipelopori UGM mengacu pada RUSNAS (Riset Unggulan Strategis Nasional) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Kemendiknas Ristek) dan Industri Prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Menurut Kemendiknas Ristek, fokus bidang iptek mencakup: (a) Ketahanan pangan; (b) Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan; (c) Sumber Energi Baru dan Terbarukan; (d) Teknologi dan Manajemen Transportasi; (e) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (f) Teknologi Pertahanan dan Keamanan. Kluster industri prioritas berdasarkan Perpres No. 28/2008 mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu, serta industri kecil dan menengah tertentu.

Hasil riset RUSNAS yang dilakukan para peneliti UGM ini akan disajikan dalam 1st IIRF (Indonesia Industry Research Forum) di Hotel Borobudur tanggal 2 Desember besok.

Catch-up Industrialization

Dinamika industri nasional dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Ketika krisis jilid I melanda Indonesia pada tahun 1997-1999, peranan industri manufaktur terhadap total ekspor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan industri terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruhnya, mengurangi kapasitas produksi, dan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya.

Bayang-bayang krisis jilid II berikutnya ditandai oleh gejala deindustrialisasi yang mulai terlihat di sentra-sentra utama industri padat karya khususnya di pulau Jawa maupun daerah yang terkena bencana alam (Kuncoro, 2007: bab 16). Gejala deindustrialisasi dini ini harus dicari akar masalahnya.

Suehiro (2008), dalam studinya di negara-negara Asia Timur, menemukan bahwa gejala tersebut merupakan fenomena yang wajar dari negara yang melakukan industrialisasi yang mengejar ketertinggalan (*catch-up industrialization*). Di Asia Timur, Jepang adalah negara pertama yang mencoba, diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara ASEAN. Dua fenomena umum yang muncul: pertama, negara yang baru saja melakukan industrialisasi biasanya tertinggal dalam hal teknologi dan produk. Kedua, negara ini biasanya mengimpor sebagian besar produk industrinya, memulai strategi industrialisasi substitusi impor, dan mengandalkan industri padat karya.

Dalam konteks inilah, diperlukan reindustrialisasi, terutama untuk industri yang telah dicanangkan sebagai industri prioritas dalam Kebijakan Industri Nasional. Hasil riset RUSNAS yang dilakukan tim peneliti UGM merekomendasikan sejumlah langkah penting bagi industri dan pemerintah untuk masing-masing industri prioritas.

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan salah satu agenda pembangunan yang sangat penting yang dibicarakan dalam *National Summit* bulan Oktober 2009. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

Untuk menopang ketahanan pangan, RUSNAS merekomendasi para pelaku dalam industri pangan untuk industri berupa penyediaan dana yang cukup bagi lokal, mengembangkan produk pangan lokal yang potensial agar nilai tambah lebih tinggi, industri bidang pertanian berkolaborasi dengan peneliti. Sedangkan untuk pemerintah adalah dengan memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran yang lebih baik, mengkaji lebih dalam produk-produk impor, mendorong teknologi bagi pangan lokal, dan membuat kebijakan yang kondusif bagi industri pangan dengan menggunakan *roadmap* yang jelas.

Industri energi baru dan terbarukan perlu meningkatkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dalam hal kajian aspek kelayakan aspek teknoekonomi, operasional produksi sesuai dengan kapasitas dan peluang, dan melanjutkan dukungan pada sinergi penelitian yang potensial. Sedangkan bagi pemerintah diharapkan dapat mereduksi konsumsi BBM dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk Jawa Bali. Untuk industri teknologi informasi dan telekomunikasi pendukung industri elektronika dan telematika disarankan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mengantisipasi perubahan trend dengan R&D. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan regulasi sebagai kerangka hukum bagi tatanan baru yang didorong oleh perkembangan TIK serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Teknologi Hankam sebaiknya mengedepankan strategi riset yang perlu dijalankan adalah masih tetap menggunakan pola kemitraan UIC (*University-Industry-Community*) dan peningkatan dana yang besar untuk melakukan riset-riset lanjutan. Bagi industri kesehatan dan obat, dukungan besar dari industri diperlukan untuk mengakomodasi potensi bahan alam menjadi bahan baku obat untuk terapi beberapa jenis penyakit diperlukan; serta pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan yang berbasis pada biomaterial

yang ada di Indonesia. Sedangkan pemerintah sebaiknya mengembangkan kebijakan *drug development* menggunakan bahan alam atau yang berasal dari Indonesia dan mendukung dan mewujudkan produk nasional berskala global melalui kebijakannya

-
- *Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; penulis buku. "Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global" <http://www.mudrajad.com>.*